

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi adalah bahasa bisnis yang merupakan suatu proses mencatat, mengklasifikasi dan mengkomunikasi data keuangan seperti penjualan, beban-beban, dan informasi keuangan penting lainnya kepada manajemen. Ada sedikit perbedaan antara akuntansi dan pembukuan. Pembukuan merupakan bagian dari akuntansi yaitu proses pencatatannya saja, sedangkan akuntansi mencakup juga identifikasi dan komunikasi. Catatan-catatan akuntansi yang baik dalam bisnis kecil diperlukan untuk tujuan internal dan eksternal.

Tujuan penyelenggaraan catatan atas penghasilan dan beban-beban membantu manajemen dalam mengendalikan operasional perusahaan dan mengambil keputusan-keputusan bisnis yang tepat. Catatan-catatan akuntansi ini juga untuk memenuhi ketentuan-ketentuan pemerintah sebagai regulator, pelanggan dan lembaga keuangan. SAK ETAP : Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 17 Juli lalu telah meluncurkan standar akuntansi ETAP (SAK-ETAP) bertepatan dalam acara Seminar Nasional Akuntansi “Tiga pilar Standar Akuntansi Indonesia” yang dilaksanakan oleh Universitas Brawijaya dan Ikatan Akuntan Indonesia. Nama standar ini sedikit unik karena exposure draftnya diberi nama Standar Akuntansi UKM (Usaha Kecil dan Menengah), namun mengingat definisi

UKM sendiri sering berubah, maka untuk menghindari kerancuan, standar ini diberi nama SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Apabila SAK-ETAP ini telah berlaku efektif, maka perusahaan kecil seperti UKM tidak perlu membuat laporan keuangan dengan menggunakan PSAK umum yang berlaku. Di dalam beberapa hal SAK ETAP memberikan banyak kemudahan untuk perusahaan dibandingkan dengan PSAK dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. Perbedaan secara kasat mata dapat dilihat dari ketebalan SAK-ETAP yang hanya sekitar seratus halaman dengan menyajikan 30 bab.

Sesuai dengan ruang lingkup SAK ETAP maka standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur dan lembaga pemerintah kredit.

Lebih lanjut ruang lingkup standar ini juga menjelaskan bahwa Entitas dikatakan memiliki akuntabilitas publik signifikan jika “proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal atau entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang atau pedagang efek, dana pensiun, reksadana dan bank investasi.

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi yang mengizinkan penggunaan standar tersebut. Hal ini dimungkinkan apabila misalnya pihak otoritas berwenang merasa ketentuan pelaporan dengan

menggunakan PSAK terlalu tinggi biayanya ataupun terlalu rumit untuk entitas yang mereka awasi.

SAK-ETAP ini akan berlaku efektif per 1 Januari 2011 namun penerapan dini standar tersebut diperbolehkan per 1 Januari 2010. Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (*explicit and unreserved statement*) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP. Apabila perusahaan memakai SAK ETAP, maka auditor yang akan melakukan audit di perusahaan tersebut juga akan mengacu kepada SAK ETAP.

Mengingat kebijakan akuntansi SAK ETAP di beberapa aspek lebih ringan daripada PSAK, maka ketentuan transisi dalam SAK ETAP ini cukup ketat. Pada BAB 29 misalnya disebutkan bahwa pada tahun awal penerapan SAK ETAP, yakni 1 Januari 2011. Entitas yang memenuhi persyaratan untuk menerapkan SAK ETAP dapat menyusun laporan keuangan tidak berdasarkan SAK ETAP, tetapi berdasarkan PSAK non-ETAP sepanjang diterapkan secara konsisten. Entitas tersebut tidak diperkenankan untuk kemudian menerapkan SAK ETAP ini untuk penyusunan laporan keuangan berikutnya. Oleh sebab itu per 1 Januari 2011, perusahaan yang memenuhi definisi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik harus memilih. Apakah akan tetap menyusun laporan keuangan menggunakan PSAK atau beralih menggunakan SAK ETAP.

Diharapkan dengan adanya SAK ETAP perusahaan kecil ataupun menengah mampu untuk :

1. Menyusun laporan keuangannya sendiri, sehingga dapat membantu untuk memperoleh pendanaan.

2. Dapat diaudit dan mendapatkan opini audit, sehingga dapat menggunakan laporan keuangannya untuk mendapatkan dana (misalnya dari Bank) untuk pengembangan usaha.
3. Lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK – IFRS sehingga lebih mudah dalam implementasinya.
4. Tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan.

Adapun keuntungan dari penggunaan SAK ETAP, antara lain :

1. Lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK – IFRS sehingga lebih mudah dalam implementasinya.
2. Tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan.
3. Disusun dengan mengadopsi IFRS for SME dengan modifikasi sesuai kondisi di Indonesia dan dibuat lebih ringkas.
4. SAK ETAP masih memerlukan *professional judgement* namun tidak sebanyak untuk PSAK – IFRS.
5. Dalam beberapa hal tidak ada perubahan signifikan dibandingkan dengan PSAK lama : contoh PSAK no 27 tahun 2007. Namun ada beberapa hal yang dimodifikasi dari IFRS/IAS.
6. PSAK yang disederhanakan :
 1. Pilihan pada alternatif standar yang lebih sederhana
 2. Penyederhanaan pengakuan dan pengukuran
 3. Mengurangi pengungkapan
 4. Penyederhanaan

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah:

1. Apakah penerapan laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam di koperasi wanita makmur sejahtera termasuk standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik?
2. Apakah standar Koperasi Wanita Makmur Sejahtera telah menerapkan standar SAK ETAP?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam di koperasi Makmur Sejahtera termasuk atau tidak dalam entitas tanpa akuntabilitas publik.
2. Untuk mengetahui standar Koperasi Makmur Sejahtera sudah menerapkan standar SAK ETAP atau belum menerapkan standar SAK ETAP.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Aspek Akademis, dapat memberikan pemahaman yang lebih baik khususnya mengenai penerapan SAK ETAP, meningkatkan wawasan yang dapat membandingkan yang ada di dalam perusahaan dengan teori yang di dapat selama kuliah.
- .2 Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan, dapat menentukan kebijakan di masa yang akan datang dan dapat memperoleh banyak anggota yang bergabung untuk pengembangan koperasi simpan pinjam di Desa Ngeni dan sebagai informasi tambahan dalam penyajian dan penyusunan laporan keuangan koperasi.

3. Aspek Praktis, Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dan bahan pertimbangan bagi pihak lain yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut tentang SAK ETAP sebagai tinjauan bagi perusahaan yang menerapkan SAK ETAP.